



**BKPSDM
KAB. PASER**



RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2025

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser

0543 - 22696, 21072

www.kepegawaian.paserkab@gmail.com

Jl. R.M. Noto Soenardi, Tana Paser

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Aksi Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas penyesuaian sasaran, indikator, program, kegiatan, dan target kinerja yang mengalami perubahan dari dokumen Rencana Aksi awal. Penyesuaian tersebut diperlukan untuk memastikan keselarasan dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perubahan serta RKPD Perubahan yang berlaku.

Rencana Aksi Perubahan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, sekaligus dasar evaluasi capaian kinerja agar tetap sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis instansi.

Harapannya, dokumen Rencana Aksi Perubahan ini dapat menjadi acuan yang jelas dalam mewujudkan kinerja BKPSDM Kabupaten Paser Tahun 2025 secara efektif dan akuntabel.

Tana Paser, 21 Oktober 2025
Plt. Kepala BKPSDM,



LISWANDI, SP

Pembina / IV/a

NIP. 196904151992121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sistematika Penulisan	3
BAB II	4
RENCANA AKSI	4
2.1. Rencana Strategis.....	4
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	5
2.3. Perjanjian Kinerja	12
2.4. Rencana Aksi.....	22
BAB III	30
PENUTUP.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil, pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. SAKIP menjadi dasar dalam memastikan bahwa setiap instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui rangkaian aktivitas perencanaan, pengukuran, pengelolaan, serta pelaporan kinerja secara sistematis.

Salah satu komponen penting dalam SAKIP adalah Perjanjian Kinerja (PK) yang berfungsi sebagai bentuk komitmen dan penugasan antara pimpinan pada level yang lebih tinggi kepada pimpinan pada level yang lebih rendah. Seiring pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, sering kali terjadi perubahan kebijakan, penyesuaian target, atau pergeseran prioritas pembangunan yang memerlukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja awal. Oleh karena itu, dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan perlu disusun untuk memastikan keselarasan antara sasaran, indikator, program, kegiatan, dan target kinerja dengan kondisi aktual serta dokumen perencanaan terbaru, termasuk RKT Perubahan dan RKPD Perubahan.

Sejalan dengan perubahan tersebut, penyusunan Rencana Aksi Perubahan menjadi langkah penting untuk memberikan arah yang lebih jelas, sistematis, dan terukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Aksi Perubahan memuat langkah-langkah operasional, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, serta hasil yang diharapkan sebagai penjabaran dari Perjanjian Kinerja Perubahan. Dengan adanya penyesuaian ini, implementasi program dan kegiatan dapat berjalan lebih relevan dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah.

Bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, penyusunan Rencana Aksi Perubahan merupakan bentuk komitmen dalam memperkuat implementasi SAKIP serta memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja. Dokumen ini diharapkan dapat mengoptimalkan efektivitas pengelolaan kinerja aparatur, meningkatkan budaya kerja berorientasi hasil, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paser.

Dengan demikian, penyusunan Rencana Aksi Perubahan ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip Good Governance serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi secara berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dan tantangan di tahun berjalan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan merupakan bagian penting dalam suatu laporan, proposal, atau kegiatan yang berfungsi untuk menjelaskan alasan dilaksanakannya kegiatan serta hasil yang ingin dicapai.

1.2.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Aksi Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan penyesuaian kegiatan yang berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja Perubahan.

Dokumen ini dimaksudkan untuk menjabarkan langkah-langkah operasional yang perlu dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja seiring adanya perubahan sasaran, indikator, program, kegiatan, maupun target kinerja pada tahun berjalan. Melalui Rencana Aksi Perubahan ini, seluruh kegiatan dapat disesuaikan secara terencana, terukur, dan selaras dengan RKT Perubahan, RKPD Perubahan, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, dokumen ini mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

1.2.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Perubahan BKPSDM Kabupaten Paser adalah untuk:

1. Menjabarkan secara rinci langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang telah disesuaikan dengan perubahan dalam Perjanjian Kinerja, termasuk penyesuaian indikator dan target kinerja.
2. Menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, menyesuaikan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi capaian kinerja secara sistematis dan berkelanjutan sesuai kondisi aktual tahun berjalan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah mengalami perubahan agar tetap selaras dengan sasaran strategis BKPSDM Kabupaten Paser

4. Mendorong sinergi dan koordinasi antar bidang dalam menyikapi perubahan perencanaan dan memastikan keterpaduan pelaksanaan kegiatan.
5. Memperkuat budaya kinerja aparatur dengan memastikan bahwa setiap perubahan kegiatan tetap memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis instansi.
6. Menjadi alat ukur dan dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja setelah dilakukan penyesuaian, serta menjadi bahan penting dalam penyusunan rencana kerja pada periode selanjutnya.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Laporan Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Aksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

Bab II Rencana Aksi

Menjelaskan tentang rencana strategis, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan rencana aksi.

Bab III Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran.

BAB II

RENCANA AKSI

Rencana Aksi merupakan dokumen yang berisi uraian langkah-langkah strategis dan operasional yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Rencana Aksi disusun secara sistematis untuk memastikan setiap kegiatan memiliki arah yang jelas, waktu pelaksanaan yang terukur, penanggung jawab yang pasti, serta hasil yang diharapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, Rencana Aksi berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengelolaan, serta pengembangan aparatur daerah agar selaras dengan visi, misi, dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Paser.

2.1. Rencana Strategis

Sebagai perwujudan pemenuhan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 277, maka perlu menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan perencanaan yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan yang disusun memerlukan keselarasan dan kesinambungan antara rencana dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Paser, sedangkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Paser, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang berkembang dan analisa eksternal dalam upaya mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi diluar organisasi. Perubahan rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

Adapun tujuan- dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser adalah:

1. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas.

Sedangkan sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator :

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN

Indikator :

- Hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit
- Indeks Survei Kepuasan Pelayanan Kepegawaian
- Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (diklat teknis, fungsional dan sosio kultural)
- Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kebijakan umum dan program pembangunan secara nyata harus bisa terukur dan dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan. Tolok ukur tersebut berupa indikator-indikator kinerja pembangunan. Indikator yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Indikator kinerja lembaga atau unit kerja, perlu dirancang metode atau teknik dan tata cara yang jelas dan sistematis sebagai instrument penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja didasarkan kepada penetapan indikator kinerja, bobot masing-masing indikator dari capaian indikator dimaksud. Sedangkan pencapaian indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data (informasi) untuk menentukan kinerja kegiatan yang didasarkan pada masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), indikator manfaat (*benefit*) dan indikator dampak (*impact*).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD indikator Kabupaten Paser. Indikator pembangunan merupakan tolak ukur pencapaian pembangunan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja tersebut merupakan implemntasi dari target pencapaian misi Kabupaten Paser.

Sebagaimana diuraikan pada Renstra BKPSDM Kabupaten Paser tahun 2021-2026 merupakan salah dua pendukung RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, karena BKPSDM merupakan salah dua Perangkat Daerah yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi-2 ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transfaran.*** Namun atas hasil evaluasi renstra tahun 2022 dan beberapa faKtor dilakukan review atas Rencana Srategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana disebutkan dalam surat usulan perubahan Renstra BKPSDM tahun 2021-2026 nomor 050/303/Sek.II/BKPSDM dengan dasar sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BKPSDM tahun 2022 oleh APIP Inspektorat
2. Perubahan Tugas dan Fungsi BKPSDM berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
3. Perubahan numenkatur indikator dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

4. Perubahan Isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

Maka Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2021-2026 adalah seperti tertuang dalam tabel tersebut.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sakip adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.sebagai upaya peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat kegiatan dan sub kegiatan urusan penunjang yang presentasenya didapat dengan menjumlahkan seluruh capaian kinerja kegiatan	<p>Nilai Capaian SAKIP berdasarkan hasil penilaian pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) APIP oleh Inspektorat.</p> $\text{Nilai SAKIP} = \sum_{i=1}^n \text{Skor aspek}_i$ <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>	Inspektorat
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN	Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	Sebagai tolok ukur untuk menilai penerapan Sistem merit atas pemenuhan dokumen penilaian mandiri penerapan Sistem merit yang memuat 8 (delapan) aspek penilaian. Sebelum menyelenggarakan pelaksanaan	Jumlah aspek dan sub aspek dalam komponen penilaian mandiri system merit yang telah terpenuhi, yang terdiri atas aspek perencanaan kebutuhan pegawai, aspek pelaksanaan pengadaan	Laporan Evaluasi Rencana Aksi Tindak lanjut Penilaian Mandiri Sistem Merit

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
			sistem merit diwajibkan memenuhi penilaian penerapan sistem merit dengan kategori IV yaitu predikat <i>Baik</i> .	<p>pegawai, aspek pengembangan karir, aspek promosi, aspek mutasi dan rotasi, aspek manajemen kinerja, aspek penggajian, aspek penghargaan dan penegakan disiplin, aspek perlindungan dan pelayanan serta aspek ketersediaan system informasi</p> $Index = \sum_{i=1}^n Skor\ aspek_i$ <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif.</p>	oleh TIM Penilaian Mandiri Sistem Merit.
		Indeks Survei Kepuasan Pegawai	Sebagai tolok Ukur untuk menilai tingkat kepuasan layanan atas pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah , dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas	Perkalian antara skor survey pelayanan kepegawaian dengan jumlah frekuensi dibagi dengan jumlah sampel keseluruhan.	Hasil survey kepuasan atas pelayanan kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
			pendapat pengguna layanan terhadap beberapa unsur layanan kepegawaian yang sudah ditetapkan sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan perbaikan dan menjadi pendorong bagi setiap unsur dalam hal peningkatan kualitas layanan kepegawaian	$IKM = \frac{\sum_{i=1}^n Skor_i \times f_i}{\sum_{i=1}^n f_i}$ <p><i>Tipe Penghitungan :</i> Non kumulatif/ Kuantitatif</p>	
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Suatu ukuran perbandingan yang digunakan untuk mengukur Jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mendapatkan pelatihan teknis dengan maksimal pelatihan setia Aparatur Sipil Negara yaitu 20 JP dalam dua tahun dengan jumlah ASN.	<p>Jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti atau mendapatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan formal baik diklat teknis, fungsional maupun struktural sesuai dengan kebutuhan dibagi dengan jumlah pegawai secara keseluruhan dikali seratus persen</p> $X = \frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100\%$ <p><i>Tipe Penghitungan :</i> Kumulatif</p>	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu Pemerintah Kabupaten Paser (SIMPADU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		<p>Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural</p>	<p>Suatu ukuran perbandingan yang digunakan untuk mengukur Jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mendapatkan pelatihan struktural dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas dengan jumlah jabatan serta mengukur jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mendapatkan pelatihan dasar yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan jumlah total jabatan.</p>	<p>Jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti atau mendapatkan fasilitas diklat kepemimpinan atau diklat structural sesuai dengan kebutuhan dalam jenjang jabatan baik diklat kepemimpinan tingkat IV, IV, II maupun I.</p> $x = \frac{\text{Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural}}{\text{Jumlah total jabatan}} \times 100\%$ <p><i>Tipe Penghitungan :</i> Kumulatif</p>	<p>Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu Pemerintah Kabupaten Paser (SIMPADU)</p>

2.3. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2025 - 2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2025 meliputi 2 (dua) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui beberapa indikator kinerja sasaran beserta targetnya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Paser

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	71,51
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN	Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	Nilai	250
		Indeks Survei Kepuasan Layanan Kepegawaian	Indeks	82
		Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	95
		Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	90

➤ Interpretasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

- Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 71,51.
- Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan sesuai prinsip akuntabilitas. Nilai SAKIP sebesar 71,51 menggambarkan komitmen perangkat daerah dalam menerapkan sistem manajemen

kinerja yang terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

- Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN
Sasaran ini memiliki beberapa indikator untuk menggambarkan peningkatan profesionalisme dan kualitas pengelolaan SDM aparatur, yaitu:
 - ✓ Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (Nilai: 250)
Nilai ini menunjukkan upaya penerapan prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN, di mana setiap proses kepegawaian dilaksanakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan atas dasar pertimbangan lain di luar profesionalitas.
 - ✓ Indeks Survei Kepuasan Layanan Kepegawaian (Target: 82)
Indeks ini mencerminkan tingkat kepuasan ASN terhadap layanan kepegawaian yang diberikan oleh BKPSDM. Target 82 menunjukkan bahwa pelayanan diharapkan berada pada kategori baik, dengan peningkatan kualitas, kecepatan, dan responsivitas layanan.
 - ✓ Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Target: 95%)
Angka ini menunjukkan komitmen dalam peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan formal dan pelatihan teknis, agar ASN mampu melaksanakan tugas secara profesional dan sesuai kebutuhan jabatan.
 - ✓ Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Target: 90%)
Target ini menunjukkan upaya pengembangan kapasitas manajerial pejabat struktural melalui pelatihan kepemimpinan dan manajemen pemerintahan, guna mendukung pelaksanaan fungsi organisasi secara efektif dan efisien.

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis
BKPSDM Kabupaten Paser Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Target	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					18.953.949.068,00	
A.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,51	Indeks	10.022.791.347,00	Sekretariat
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Lainnya	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	87	Indeks	10.022.791.347,00	Sekretariat
1.1.	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	100	Persen	178.029.166,00	Sekretariat
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Dokumen	104.505.292,00	Sekretariat
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	Laporan	73.523.874,00	Sekretariat
1.2.	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan PD	85	Persen	9.224.195.464,00	Sekretariat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658	Orang/ Bulan	9.108.695.704,00	Sekretariat
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	300	Dokumen	115.499.760,00	Sekretariat

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Target	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85	Persen	7.500.000,00	Sekretariat
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	7.500.000,00	Sekretariat
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87	Persen	339.555.489,00	Sekretariat
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	10.024.518,00	Sekretariat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	26.080.791,00	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	39.713.002,00	Sekretariat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	13.807.178,00	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	Dokumen	3.798.000,00	Sekretariat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	195.855.000,00	Sekretariat
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	50.277.000,00	Sekretariat

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Target	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7
1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	52.859.031,00	Sekretariat
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	21.333.688,00	Sekretariat
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	31.525.343,00	Sekretariat
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	12.249.250,00	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	Laporan	500.000,00	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	11.749.250,00	Sekretariat
1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	208.402.947,00	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	34.931.792,00	Sekretariat
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	Unit	40.755.000,00	Sekretariat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	113.016.155,00	Sekretariat

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Target	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32	Unit	19.700.000,00	Sekretariat
B	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN	Hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit	250	Nilai	8.931.157.721,00	
		Indeks Survei Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	82	Indeks		
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (diklat teknis, fungsional dan sosio kultural)	95	Persen		
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	90	Persen		
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	100	Persen	1.198.981.979,00	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi kebutuhan pegawai yang terpenuhi berdasarkan jumlah bezzeting/formasi yang diusulkan	100	Persen	1.198.981.979,00	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
		Persentase data kepegawaian yang terupdate/diremajakan	100	Persen		Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen	626.943.274,00	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Target	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi Pelaksanaan Administasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	Dokumen	57.928.253,00	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	4	Dokumen	69.160.183,00	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	121.617.699,00	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	164.098.000,00	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	Dokumen	108.016.570,00	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4	Laporan	51.218.000,00	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan	80	Persen	3.893.641.094,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi
2.2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi sesuai syarat jabatan	92	Persen	1.012.414.000,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3	Dokumen	86.236.000,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Target	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800	Dokumen	164.540.000,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	Dokumen	761.638.000,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi
2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti peningkatan kompetensi sesuai dengan syarat kompetensi dalam jabatan	92	Persen	2.881.227.094,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	Dokumen	229.044.981,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	7	Dokumen	2.000.670.113,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10	Orang	499.204.000,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100	Orang	118.100.000,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	60	Orang	34.208.000,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai berkinerja baik	100	Persen	743.696.663,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN dengan Nilai SKP Baik	100	Persen	743.696.663,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Target	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase ASN yang Mendapatkan Penghargaan (SLKS dan ASN Berprestasi)	92	Persen		Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
		Persentase ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kinerja/Disiplin Pegawai	85	Persen		Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3	Dokumen	58.594.500,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13	Dokumen	120.394.500,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13	Laporan	77.252.000,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	2000	Orang	279.627.713,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300	Orang	37.708.200,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	13	Laporan	80.293.500,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	5	Dokumen	26.505.674,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Target	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7
	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	13	Laporan	63.320.576,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	85	Persen	3.094.837.985,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi
3.1.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Calon ASN dan ASN yang Telah Lulus Memenuhi Diklat Perjenjangan	95	Persen	3.094.837.985,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional Peningkatan Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional Peningkatan Kepemimpinan, dan Prajabatan	2	Laporan	3.094.837.985,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi

2.4. Rencana Aksi

Rencana Aksi Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Perubahan BKPSDM Kabupaten Paser Tahun 2025. Dokumen ini disusun sebagai pedoman untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan yang telah mengalami penyesuaian, baik dari sisi indikator, target, maupun tahapan pelaksanaannya, agar tetap berjalan secara terukur, terjadwal, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah diselaraskan.

Rencana Aksi Perubahan ini disusun secara sistematis untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan program kerja setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan RKT Perubahan dan RKPD Perubahan Tahun 2025. Setiap kegiatan dirinci kembali dalam bentuk rencana aksi yang memuat tahapan pelaksanaan, indikator kinerja yang disesuaikan, waktu pelaksanaan (per bulan atau per triwulan), serta penanggung jawab pelaksana yang relevan dengan struktur perubahan. Melalui penyusunan Rencana Aksi Perubahan ini, diharapkan seluruh aparatur di lingkungan BKPSDM Kabupaten Paser memiliki pedoman yang lebih akurat dan relevan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dokumen ini sekaligus menjadi instrumen penting untuk menjaga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program kerja tahun 2025, terutama dalam menghadapi dinamika perubahan perencanaan.

Adapun Rencana Aksi Perubahan BKPSDM Kabupaten Paser Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Rencana Aksi Pencapaian Sasaran Strategis
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Rencana Aksi Perubahan	Anggaran Perubahan	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan												
			Target	Satuan				I			II			III			IV			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser					18.953.949.068,00														
A.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,51	Indeks		10.022.791.347,00	Sekretariat	71,51	71,51	71,51	71,51	71,51	71,51	71,51	71,51	71,51	71,51	71,51	71,51	
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Lainnya	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	87,00	Indeks		10.022.791.347,00	Sekretariat	-	-	77,00	-	-	77,00	-	-	77,00	-	-	77,00	
1.1.	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	100,00	Persen	Melaksanakan Penyusunan Dokumen, dan Evaluasi Kinerja dengan tepat waktu dan sesuai target	178.029.166,00	Sekretariat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,00	Dokumen	Melaksanakan penyusunan dan penyesuaian dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah secara terintegrasi dan tepat waktu, meliputi Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi Kinerja, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Renja Perubahan Tahun 2025, serta Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, beserta dokumen perencanaan pendukung lainnya sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan	104.505.292,00	Sekretariat	1,00	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	2,00	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,00	Laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan setiap triwulan melalui pengumpulan dan pengolahan data kinerja untuk diinput ke dalam tabel evaluasi Renja. Selanjutnya, data tersebut digunakan dalam penyusunan laporan kinerja internal triwulan serta laporan monitoring dan evaluasi (monev) rencana aksi kegiatan setiap triwulan. Selain itu, dilakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun sebelumnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja	73.523.874,00	Sekretariat	-	-	3,00	-	-	3,00	-	-	3,00	-	-	-	3,00
1.2.	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan PD	85,00	Persen	Melaksanakan pengelolaan keuangan dengan tepat waktu serta meningkatkan pelayanan administrasi keuangan	9.224.195.464,00	Sekretariat	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658,00	Orang/Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan melalui pemutakhiran dan verifikasi data kepegawaian sebagai dasar perhitungan gaji dan tunjangan, penyusunan serta verifikasi perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penyiapan dokumen administrasi pembayaran, dan pelaksanaan pembayaran gaji serta tunjangan	9.108.695.704,00	Sekretariat	42,00	42,00	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Rencana Aksi Perubahan	Anggaran Perubahan	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
			Target	Satuan				I			II			III			IV		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					ASN secara tepat waktu setiap bulan, disertai dengan rekonsiliasi, pelaporan realisasi, serta monitoring dan evaluasi untuk menjamin ketepatan, kepatuhan, dan akuntabilitas pelaksanaannya.														
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	300,00	Dokumen	Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dilaksanakan dalam rangka menjamin tertib administrasi, akurasi, dan keandalan pengelolaan akuntansi keuangan pada SKPD. Pelaksanaan subkegiatan ini mencakup koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pengumpulan dan verifikasi data transaksi keuangan, pencatatan dan pengklasifikasian transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta penyusunan laporan keuangan SKPD secara berkala. Melalui subkegiatan ini diharapkan pelaksanaan akuntansi pada SKPD dapat berjalan sesuai ketentuan, mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi dasar yang andal dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.	115.499.760,00	Sekretariat	5,00	5,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	35,00
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85,00	Persen	Melaksanakan peningkatan terkait pelayanan administrasi kepegawaian	7.500.000,00	Sekretariat	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50,00	Orang	Melaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Kepegawaian di Lingkungan Kabupaten Paser	7.500.000,00	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87,00	Persen	Melakukan peningkatan pelayanan administrasi umum	339.555.489,00	Sekretariat	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2,00	Paket	Memenuhi Kebutuhan Komponen Kelistrikan pada Gedung dan Fasilitas Kantor BKPSDM	10.024.518,00	Sekretariat	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	Memenuhi Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor BKPSDM	26.080.791,00	Sekretariat	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00	Paket	Memenuhi Kebutuhan Logistik Kantor Penunjang Administrasi Perkantoran	39.713.002,00	Sekretariat	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,00	Paket	Memenuhi Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan tersedia untuk kebutuhan administrasi kantor	13.807.178,00	Sekretariat	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2,00	Dokumen	Memenuhi Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.798.000,00	Sekretariat	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Rencana Aksi Perubahan	Anggaran Perubahan	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
			Target	Satuan				I			II			III			IV		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	Laporan	Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPSDM	195.855.000,00	Sekretariat	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	7,00	5,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,00	Dokumen	Memenuhi Pelayanan Penatausahaan Arsip pada BKPSDM	50.277.000,00	Sekretariat	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100,00	Persen	Mengevaluasi ketersediaan pengadaan barang milik daerah pada BKPSDM	52.859.031,00	Sekretariat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4,00	Unit	Memenuhi Kebutuhan Meubelair BKPSDM	21.333.688,00	Sekretariat	2,00	-	-	2,00	-	-	2,00	-	-	3,00	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2,00	Unit	Memenuhi Kebutuhan Peralatan dan mesin BKPSDM	31.525.343,00	Sekretariat	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100,00	Persen	Memenuhi ketersediaan jasa penunjang terkait kegiatan di BKPSDM	12.249.250,00	Sekretariat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,00	Laporan	Memenuhi Kebutuhan Penyediaan bahan Keabsahan Dokumen Administrasi Kantor	500.000,00	Sekretariat	-	-	2,00	-	-	3,00	-	-	2,00	-	-	3,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3,00	Laporan	Memenuhi Kebutuhan Add on Zoom Kantor	11.749.250,00	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100,00	Persen	Melakukan pemeliharaan terkait barang milik daerah	208.402.947,00	Sekretariat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3,00	Unit	Memenuhi Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Sebanyak 3 Unit	34.931.792,00	Sekretariat	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32,00	Unit	Memenuhi Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Kantor	40.755.000,00	Sekretariat	-	-	-	-	-	17,00	-	-	-	-	-	15,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	Unit	Memenuhi Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor	113.016.155,00	Sekretariat	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32,00	Unit	Memenuhi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	19.700.000,00	Sekretariat	-	-	-	12,00	-	-	-	-	-	-	12,00	-
B	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN	Hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit	250,00	Nilai	Menyusun dan melengkapi dokumen-dokumen terkait penilaian sistem merit	8.931.157.721,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00	250,00
		Indeks Survei Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	87,00	Indeks	Melaksanakan survei terkait kepuasan layanan kepegawaian			-	-	82,00	-	-	82,00	-	-	82,00	-	-	82,00

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Rencana Aksi Perubahan	Anggaran Perubahan	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
			Target	Satuan				I			II			III			IV		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (diklat teknis, fungsional dan sosio kultural)	95,00	Persen	Melaksanakan Pelatihan teknis dan Pelatihan fungsional			-	-	10,00	-	-	25,00	-	-	30,00	-	-	30,00
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	90,00	Persen	Melaksanakan Pelatihan Manajeria yaitu PKN tingkat II, PKA , PKP dan Latsar CPNS			-	-	15,00	-	-	20,00	-	-	25,00	-	-	30,00
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	100,00	Persen		1.198.981.979,00	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	88,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi kebutuhan pegawai yang terpenuhi berdasarkan jumlah bezzeting/formasi yang diusulkan	100,00	Persen	Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pemenuhan jumlah kebutuhan ASN dan jumlah formasi yang akan diusulkan	1.198.981.979,00	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase data kepegawaian yang terupdate/diremajakan	100,00	Persen	Melakukan pembaharuan data-data kepegawaian		Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2,00	Dokumen	Melakukan penyusunan formasi ASN, pengadaan ASN serta Usul Penetapan NIP	626.943.274,00	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1,00	Dokumen	Penyelesaian SK BUP, kenaikan pangkat, SK pemberhentian dan SK pensiun	57.928.253,00	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	4,00	Dokumen	Melakukan evaluasi pemberhentian ASN dan evaluasi hasil kesalahan pemberkasan atau kendala pemberhentian ASN	69.160.183,00	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1,00	Lembaga	Melaksanakan apel siaga korpri dan pembinaan profesi ASN/kode etik	121.617.699,00	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1,00	Dokumen	Melakukan pemeliharaan, pembaruan, dan integrasi sistem informasi kepegawaian (aplikasi internal), menerbitkan dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dan teknis	164.098.000,00	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1,00	Dokumen	Melakukan verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala, memastikan konsistensi dan sinkronisasi dengan sistem nasional, serta menerbitkan dokumen hasil pengelolaan data sebagai acuan tata kelola ASN.	108.016.570,00	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4,00	Laporan	Melaksanakan evaluasi triwulanan terhadap kualitas data, kelengkapan informasi, dan efektivitas sistem informasi kepegawaian, serta menyusun laporan hasil evaluasi sebagai	51.218.000,00	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Rencana Aksi Perubahan	Anggaran Perubahan	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
			Target	Satuan				I			II			III			IV		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					dasar perbaikan dan pengambilan kebijakan.														
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan	80,00	Persen		3.893.641.094,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi	-	-	20,00	-	-	20,00	-	-	20,00	-	-	15,00
2.2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi sesuai syarat jabatan	92,00	Persen		1.012.414.000,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi	-	-	20,00	-	-	25,00	-	-	25,00	-	-	25,00
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3,00	Dokumen	Melaksanakan Pelayanan Mutasi PNS yaitu mutasi antar Instansi dan Mutasi Dalam Instansi	86.236.000,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800,00	Dokumen	Melaksanakan Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS	164.540.000,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi	-	-	250,00	-	-	250,00	-	-	250,00	-	-	250,00
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2,00	Dokumen	Melaksanakan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta pelaksanaan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser	761.638.000,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti peningkatan kompetensi sesuai dengan syarat kompetensi dalam jabatan	92,00	Persen		2.881.227.094,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	45,00
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1,00	Dokumen	Melaksanakan Assessment (Penilaian Potensi dan Kompetensi) terhadap seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kab. Paser	229.044.981,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	7,00	Dokumen	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Teknis yaitu Pelaksanaan Pelatihan PBJ angkatan 2, 3, dan 4, melaksanakan Pelatihan GTA Junior Office Operator dan memfasilitasi Pelatihan dari beberapa Perangkat Daerah	2.000.670.113,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10,00	Orang	Melaksanakan Monitoring terhadap PNS Tugas Belajar dan melakukan penyelesaian Administrasi Beasiswa bagi PNS Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis	499.204.000,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi	-	-	2,00	-	-	2,00	-	-	2,00	-	-	2,00
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100,00	Orang	Melaksanakan Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional berupa Pengangkatan kedalam JF, Kenaikan Jenjang JF, Perpindahan JF dan Pemberhentian JF	118.100.000,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi	-	-	5,00	-	-	5,00	-	-	10,00	-	-	5,00

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Rencana Aksi Perubahan	Anggaran Perubahan	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
			Target	Satuan				I			II			III			IV		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	60,00	Orang	Melaksanakan Pelayanan Peninjauan Masa Kerja PNS	34.208.000,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi	-	-	10,00	-	-	10,00	-	-	20,00	-	-	10,00
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai berkinerja baik	100,00	Persen		743.696.663,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN dengan Nilai SKP Baik	100,00	Persen		743.696.663,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
		Persentase ASN yang Mendapatkan Penghargaan (SLKS dan ASN Berprestasi)	92,00	Persen			Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan	-	-	20,00	-	-	20,00	-	-	20,00	-	10,00	25,00
		Persentase ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kinerja/Disiplin Pegawai	85,00	Persen			Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan	-	-	20,00	-	-	20,00	-	-	25,00	-	20,00	-
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3,00	Dokumen	Melaksanakan penyusunan kebijakan terkait penilaian dan evaluasi kinerja ASN	58.594.500,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13,00	Dokumen	Melaksanakan Pelayanan Konsultasi mengenai SKP ASN dan melaksanakan kegiatan monitoring terkait hasil capaian kinerja ASN Kabupaten Paser dan menganalisa hasil capaian tersebut untuk menjadi bahan evaluasi, dan juga mendampingi Wajib Laport (WL) dalam kepatuhan dalam pengisian LHKPN.	120.394.500,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13,00	Laporan	Melaksanakan tindak lanjut terkait capaian kinerja ASN sebagai bentuk tindakan Persuasif dan Preventif dalam meningkatkan Kinerja ASN Kabupaten Paser	77.252.000,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	2000,00	Orang	Melaksanakan Pelayanan Usulan Kenaikan Gaji Berkala	279.627.713,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan	-	-	200,00	-	-	200,00	-	-	200,00	-	-	200,00
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300,00	Orang	Melaksanakan Pelayanan Usulan Satyalancana Karya Satya	37.708.200,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	13,00	Laporan	Melaksanakan tindak lanjut terkait Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	80.293.500,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	5,00	Dokumen	Melaksanakan Pelayanan dan tidak lanjut terkait Proses Izin Perceraian Pegawai	26.505.674,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan	-	-	10,00	-	-	10,00	-	-	10,00	-	-	20,00
	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	13,00	Laporan	Melaksanakan Monitoring dan evaluasi ke perangkat daerah terakait Evaluasi Disiplin ASN	63.320.576,00	Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Rencana Aksi Perubahan	Anggaran Perubahan	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
			Target	Satuan				I			II			III			IV		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	85,00	Persen		3.094.837.985,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	60,00
3.1.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Calon ASN dan ASN yang Telah Lulus Memenuhi Diklat Perjenjangan	95,00	Persen		3.094.837.985,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	72,00
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan FungsionalPeningkatan Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan FungsionalPeningkatan Kepemimpinan, dan Prajabatan	2,00	Laporan	Melaksanakan Pelatihan Manjerial berupa Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar CPNS	3.094.837.985,00	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja Perubahan merupakan dokumen yang memuat penyesuaian jadwal pelaksanaan Perjanjian Kinerja Perubahan, yang mencakup sasaran strategis, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target yang telah diselaraskan dengan perubahan anggaran, kebijakan, serta kebutuhan aktual organisasi. Rencana Aksi Kinerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser Tahun 2025 memiliki peran yang sangat penting karena menjadi panduan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah mengalami penyesuaian sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan BKPSDM Kabupaten Paser Tahun 2025. Selain itu, dokumen ini juga menjadi instrumen evaluatif dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja setelah dilakukan perubahan.

Keberhasilan pencapaian kinerja Pasca-perubahan sangat bergantung pada ketepatan, ketelitian, dan fleksibilitas dalam proses perencanaan. Perencanaan yang baik tidak hanya memastikan kesesuaian langkah pelaksanaan kegiatan dengan perubahan yang terjadi, tetapi juga mampu mengantisipasi potensi hambatan serta menyiapkan alternatif solusi yang diperlukan selama pelaksanaan.

Dengan tersusunnya Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Perubahan BKPSDM Kabupaten Paser Tahun 2025 ini, diharapkan seluruh unsur pelaksana di lingkungan BKPSDM dapat memperkuat komitmen, meningkatkan profesionalisme, serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang telah disesuaikan dapat direalisasikan sesuai target perubahan yang telah ditetapkan. Dokumen ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas kinerja BKPSDM Kabupaten Paser secara berkelanjutan.

Tana Paser, 21 Oktober 2025

Plt. Kepala BKPSDM,



LISWANDI, SP

Pembina / IV/a

NIP. 196904151992121002